

**PENERAPAN ASAS HAKIM BERSIFAT PASIF DALAM GUGATAN ATAS
DASAR WANPRESTASI JUAL BELI TANAH DENGAN TUNTUTAN
PEMBATALAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sby)

Oleh:

Rahayu Dwi Latifah Khusnul Khotimah

E1A022109

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan sering terjadinya suatu surat gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai cacat formil. Salah satu contoh putusan yang oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sby yang menyatakan bahwa surat gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi serta penerapan asas hakim bersifat pasif pada putusan pengadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif menggunakan data sekunder yakni Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sby dengan pengumpulan data studi kepustakaan dan disajikan melalui teks naratif serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam surat gugatan penggugat terdapat kekeliruan dalam menyusun petitum yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang ada pada surat gugatan serta telah dijalankannya asas hakim bersifat pasif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara No 33/Pst.G/2024/PN Sby sebab penarikan Notaris Dedy Wijaya, S.H bukan termasuk pada pokok perkara yang diajukan oleh para pihak, melainkan formulasi dalam suatu surat gugatan.

Kata kunci: *Asas Hakim Pasif; Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard; Pembatalan; Putusan Pengadilan*

**THE APPLICATION OF THE PASSIVE JUDGE PRINCIPLE IN
LAWSUITS FOR BREACH OF CONTRACT IN LAND
SALE AND PURCHASE AGREEMENTS WITH
CLAIMS FOR RESCISSION.
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sby)**

By:

Rahayu Dwi Latifah Khusnul Khotimah

E1A022109

ABSTRACT

This research is motivated by the frequent occurrence of lawsuits being declared inadmissible due to formal defects. One example of a decision in which the judge declared a claim inadmissible is Decision of the District Court of Surabaya Number 33/Pdt.G/2024/PN Sby, which stated that the plaintiff's statement of claim lacked necessary parties, thereby rendering the claim inadmissible. This study aims to examine and analyze the judge's considerations in deciding a claim as Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) in a lawsuit seeking annulment of an agreement on the grounds of breach of contract, as well as the application of the principle that judges are passive in the aforementioned court decision. The research method employed is normative juridical with a prescriptive research specification, using secondary data, namely Decision Number 33/Pdt.G/2024/PN Sby. Data were collected through library research and presented in narrative text form, and subsequently analyzed using a qualitative normative method. The results of this study indicate that the plaintiff's statement of claim contained errors in formulating the petitum, resulting in an inconsistency between the posita and the petitum in the statement of claim. Furthermore, the principle that judges are passive was applied by the Panel of Judges of the District Court of Surabaya in deciding Case Number 33/Pdt.G/2024/PN Sby, since the inclusion of Notary Dedy Wijaya, S.H. did not pertain to the subject matter of the dispute submitted by the parties, but rather concerned the formulation of the statement of claim itself.

Keyword: *Passive Judge Principl; Niet Ontvankelijke Verklaard Claim; Contract Cancellation; Court Decision*